

**ANALISIS REALISASI ANGGARAN BELANJA PADA KANTOR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BANDA ACEH
TAHUN 2016-2018**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi**

OLEH :

**FAHRIL ULYA
NPM : 1502110203**



**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2021**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 12 Maret 2021

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

FAHRIL ULYA
NPM : 1502110203

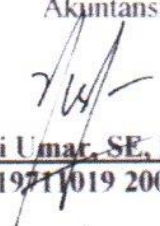
Dengan judul:

**ANALISIS REALISASI ANGGARAN BELANJA PADA
KANTOR LAPAS KELAS II A BANDA ACEH
TAHUN 2016-2018**

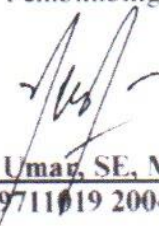
Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

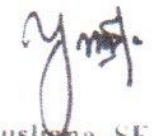
Ketua Program Studi
Akuntansi


H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing I


H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing II


Yustiana, SE, M.Si
NIK. 19650310 200410 2 001

Mengetahui,
Dekan,


Drs. Farnizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 12 Maret 2021

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

FAHRIL ULYA
NPM : 1502110203

Dengan judul:

**ANALISIS REALISASI ANGGARAN BELANJA PADA
KANTOR LAPAS KELAS II A BANDA ACEH
TAHUN 2016-2018**

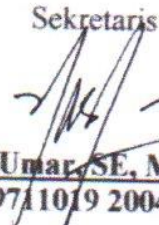
Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 13 Februari 2021

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

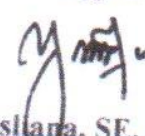
Ketua


Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris


H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

Anggota


Yuslana, SE, M.Si
NIK. 19650310 200410 2 001

Anggota


Irmawati, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19750211 200406 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi


H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU"

Banda Aceh, 12 Maret 2021

Yang Menyatakan

METERAI
TEMPEL

82E56AFF986202013

6000
ENAM RIBU RUPIAH



FAHRIL ULYA

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FAHRIL ULYA
NPM : 1502110203
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS REALISASI ANGGARAN BELANJA PADA KANTOR LAPAS KELAS II A BANDA ACEH TAHUN 2016-2018

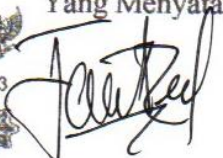
Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 12 Maret 2021

METERAI
TEMPEL
82E56AFF986202013
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Yang Menyatakan



FAHRIL ULYA

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Analisis Realisasi Anggaran Belanja Pada Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh Tahun 2016-2018”** Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar islam di atas muka bumi ini.

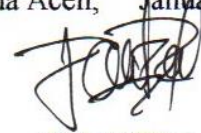
Dalam penyelesaian Skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mendidik, membesarkan, serta mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis guna tercapainya cita-cita dan terima kasih juga kepada saudara penulis yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang.
2. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA. Selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh dan juga selaku pembimbing pertama Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Ibu Yusliana, SE, M.Si. selaku pembimbing pertama Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Ibu Cut Fitrika Syawalina, SE, M.Si selaku Ketua Laboratorium Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah khususnya staf pengajar pada jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Teman-teman angkatan yang telah banyak memberikan dorongan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri, karena segala sesuatu tidak akan terjadi jika bukan atas kehendaknya.

Banda Aceh, Januari 2021



Fahril Ulya

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	8
 BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	 9
2.1 Landasan Teoritis	9
2.1.1 Anggaran	9
2.1.1.1 Pengertian Anggaran.....	9
2.1.1.2 Fungsi Anggaran.....	10
2.1.1.3 Prinsip-Prinsip Anggaran.....	12
2.1.1.4 Klasifikasi Anggaran	14
2.1.1.5 Proses Penyusunan Anggaran.....	15
2.1.1.6 Faktor-faktor Penyusunan Anggaran	17
2.1.1.7 Pihak yang Terlibat Dalam Proses Anggaran	18
2.1.2 Realisasi Anggaran	19
2.1.2.1 Pengertian Realisasi Anggaran	19
2.1.2.2 Sistem Realisasi Anggaran	20
2.1.2.3 Siklus Realisasi Anggaran	20
2.1.2.4 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	21
2.1.2.5 Tujuan Laporan Realisasi Anggaran.....	22
2.1.2.6 Manfaat Informasi Laporan Realisasi Anggaran	23
2.2 Penelitian Sebelumnya	24
 BAB III METODE PENELITIAN	 28
3.1 Desain Penelitian	28
3.2 Sumber Data	29
3.3 Teknik Pengumpulan Data	29
3.4 Teknik Analisis Data	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1 Gambaran Umum Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh	32
4.1.1 Sejarah Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh	32
4.1.2 Visi dan Misi Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh	34
4.1.3 Struktur Organisasi Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh..	35
4.2 Hasil Penelitian	36
4.2.1 Laporan Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja	36
4.2.2 Analisis Efektivitas Anggaran Belanja pada Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh.....	37
4.2.3 Analisis Efisiensi Anggaran Belanja pada Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh.....	39
4.3 Pembahasan	
4.3.1 Efektivitas Anggaran Belanja pada Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh.....	41
4.3.2 Efisiensi Anggaran Belanja pada Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh	41
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	43
5.1 Kesimpulan.....	43
5.2 Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Anggaran Belanja Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh Tahun Anggaran 2016-2018 (Dalam Rupiah)	5
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Sebelumnya	26
Tabel 4.1 Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh	36
Tabel 4.2 Rasio Efektivitas Tahun Anggaran 2016-2018	38
Tabel 4.3 Rasio Efisiensi Tahun Anggaran 2016-2018	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2016-2018.....	47
------------	---	----

ANALISIS REALISASI ANGGARAN BELANJA PADA KANTOR LAPAS KELAS II A BANDA ACEH TAHUN 2016-2018

FAHRIL ULYA
1502110203

Pembimbing : 1.) Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak. CA.
2.) Yusliana, SE, M.Si.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realisasi anggaran belanja pada Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh Tahun 2016-2018. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Objek penelitian ini adalah Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: (1) Realisasi anggaran belanja Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh berdasarkan analisis rasio efektivitas Tahun Anggaran 2016-2018 pada kategori Efektif dengan nilai efektivitas sebesar 97,18% pada tahun 2016, sebesar 99,91% pada tahun 2017, dan sebesar 99,63% pada tahun 2018, dan (2) Realisasi anggaran belanja Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh berdasarkan analisis rasio efisiensi Tahun Anggaran 2016-2018 pada kategori Tidak Efisien dengan nilai efisiensi sebesar 102,90% pada tahun 2016, sebesar 100,09% pada tahun 2017, dan sebesar 100,37% pada tahun 2018.

Kata Kunci: efektivitas, efisiensi, dan anggaran belanja

**ANALYSIS OF EXPENDITURE BUDGET REALIZATION IN KANTOR LAPAS
KELAS II A BANDA ACEH FISCAL YEARS 2016-2018**

FAHRIL ULYA
1502110203

Pembimbing : 1.) Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak. CA.
2.) Yusliana, SE, M.Si.

ABSTRACT

This study aims to determine the expenditure budget realization in Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh. This research uses qualitative descriptive methods. Data collection was carried out by means of library research and field research. The object of this research is the Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh. Based on the results of the study, it is known that: (1) The realization of the budget for the Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh is based on the analysis of the effectiveness ratio for the 2016-2018 Fiscal Year in the Effective category with an effectiveness value of 97,18% in 2016, 99,91% in 2017, and 99,63% in 2018, and (2) The realization of the budget for the Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh is based on the analysis of the efficiency ratio for the 2016-2018 Fiscal Year in the Inefficient category with an efficiency value of 102,90% in 2016, of 100,09% in 2017, and of 100,37% in 2018.

Key Words : effectiveness, efficiency, budget.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu fungsi manajemen adalah perencanaan (*planning*). Perencanaan merupakan tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan berarti menentukan sebelumnya kegiatan yang mungkin dapat dilakukan dan bagaimana cara melakukannya.

Keberhasilan suatu kegiatan dalam pencapaian tujuannya yang efisien dan efektif ditentukan oleh adanya perencanaan yang matang, organisasi yang tepat, serta pengelolaan yang baik. Dalam menyusun anggaran yang akan digunakan dalam suatu kegiatan perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga dengan adanya anggaran tersebut diharapkan anggaran dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas manajemen.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh adalah Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan (UPT) dan bertanggungjawab pada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh dengan dasar hukum keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 pasal 1 angka 3 yang tertulis “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh merupakan salah satu instansi yang bergerak dalam pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat. Tugas Pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh adalah melaksanakan pembinaan kepribadian dan kemandirian, Didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh terdapat juga salah satu anggaran yang tertuju pada bidang Pembinaan Kemandirian untuk pembiayaan Narapidana khususnya yaitu anggaran Pembinaan Kemandirian, yaitu bertujuan untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak akan mengulangnya lagi. Dengan adanya anggaran Bimbingan Kerja (BimKer) di harapkan para tahanan mendapatkan pelatihan dan keterampilan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sehingga mempunyai bekal saat masa tahanan sudah habis serta dapat diterima di masyarakat lagi.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan salah satu organisasi sektor publik yang pengelolaan keuangan harus transparansi. Dimulai dari proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran. Selain itu, akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik juga diperlukan, dalam arti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. Tentunya di dalam perjalanan sehari-hari dalam perjalanan keberadaan Lembaga Pemasyarakatan sudah pasti memiliki aturan tentang penggunaan anggaran

belanja, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No.1 tentang perbedaharaan.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam suatu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi, efektivitas dan efesiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketentuannya terhadap peraturan perundang-undangan. Seiring dengan reformasi dibidang keuangan negara maka perlu dilakukan perubahan-perubahan di berbagai bidang untuk mendukung agar reformasi di bidang keuangan Negara dapat berjalan dengan baik.

Dengan adanya penerapan prinsip-prinsip tersebut, maka akan menghasilkan pengelolaan keuangan yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat secara efisien, efektif transparan dan bertanggungjawab. Sehingga nantinya dapat dirasakan oleh masyarakat, karena masyarakatlah yang dapat menilai berhasil tidaknya Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan dibidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi akan dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Perubahan yang paling diinginkan adalah adanya standar akuntansi pemerintahan. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada

standar akuntansi pemerintahan sesungguhnya adalah dalam rangka meningkatkan kuantitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah sehingga *good governance* dapat tercapai.

Upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah mengharuskan setiap pengelolaan keuangan Negara dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Anggaran pemerintah terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik masyarakat. Anggaran publik merupakan alat perencanaan sekaligus alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) belanja yang dipublikasikan pemerintah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan pemerintah. Jika dibandingkan dengan neraca (LRA) menduduki prioritas yang lebih penting, dan LRA ini merupakan jenis laporan keuangan yang paling dahulu dihasilkan sebelum membuat laporan neraca, laporan operasional serta laporan arus kas. Anggaran dalam pemerintah merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintah. Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi dan distribusi. Oleh karena itu, LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan yang dinilai paling utama. Berdasarkan LRA

tersebut pembaca laporan dapat membuat analisis Realisasi Anggaran Belanja berdasarkan laporan keuangan berupa analisis pendapatan, analisis belanja dan analisis pembiayaan.

Pemerintah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisa kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis pengukuran realisasi anggaran belanja yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Berikut ini laporan anggaran belanja Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh tahun 2016-2018:

Tabel 1.1
Laporan Anggaran Belanja Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh Tahun
Anggaran 2016-2018 (Dalam Rupiah)

Tahun	Jumlah Anggaran Belanja	Jumlah Realisasi Belanja	Persentase
2016	9.058.254.000	8.802.653.392	97,18%
2017	8.915.223.000	8.907.076.854	99,91%
2018	11.479.949.000	11.437.302.550	99,63%

Sumber: Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh (data diolah, 2020)

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah anggaran belanja Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Pada tahun 2017 terjadi penurunan jumlah anggaran belanja sebanyak Rp. 143.031.000 dari tahun 2016. Pada tahun 2018 jumlah anggaran belanja Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh justru mengalami kenaikan sebanyak Rp. 2.564.726.000. Terjadi fluktuasinya jumlah anggaran belanja, tidak diikuti oleh jumlah realisasi anggaran belanja yang justru terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah

realisasi anggaran belanja yaitu sebesar Rp. 104.423.462. Pada tahun 2018 kembali terjadi peningkatan jumlah realisasi anggaran sebesar Rp. 2.530.225.696. Fenomena terjadinya fluktuasi jumlah anggaran dan peningkatan jumlah realisasi anggaran belanja, mengindikasikan bahwa Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh belum mampu mengoptimalkan realisasi anggaran belanja yang terlihat dari persentase realisasi anggaran yang terus turun tiap tahunnya.

Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh juga memiliki beberapa program, diantaranya di bidang Bimbingan Kerja (BimKer) melatih dan membimbing para tahanan untuk berkarya agar dapat menghasilkan manusia yang berguna dan bermanfaat. Persoalannya bagaimana Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh mengelola anggaran sehingga program-program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan oleh Pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas (pertanggungjawaban) Pemerintah atas sumber yang dipercayakan. Pengelolaan keuangan Pemerintah harus memenuhi *value for money* serta partisipasi dan transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya akan mengurangi jumlah pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan. Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengeluaran daerah, maka pemerintah daerah harus menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan.

Pengukuran realisasi anggaran belanja untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya.

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Realisasi Anggaran Belanja Pada Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh Tahun 2016-2018”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana realisasi anggaran belanja pada Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh Tahun 2016-2018.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana realisasi anggaran belanja pada Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh Tahun 2016-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat guna menambah wawasan penulis tentang Realisasi Anggaran belanja yang ada pada kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banda Aceh.

2. Bagi peneliti lain, dapat menjadi bahan acuan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama, serta memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk lebih mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya mengenai Analisis Realisasi
3. Bagi instansi, dapat memberikan saran dalam menentukan kebijaksanaan yang akan diambil dalam menentukan anggaran pada tahun yang akan datang dan mampu untuk menganalisis kelayakan suatu penyusunan anggaran yang telah ditetapkan. Juga dapat memberikan sumbangan dalam pemikiran dalam menentukan kebijaksanaan pengelolaan dan peningkatan kinerja dalam pengelolaan anggaran belanja.
4. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberi ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai Analisis Realisasi Anggaran Belanja.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian hanya difokuskan pada analisis realisasi anggaran belanja pada Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh Tahun 2016-2018.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Anggaran

2.1.1.1 Pengertian Anggaran

Munandar (2014:3) mendefenisikan anggaran (*budget*) sebagai rencana yang disusun secara sistimatis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.

Menurut Nafarin (2012:9) anggaran (*budget*) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu.

Rudianto (2014:3) menjelaskan bahwa anggaran adalah rencana kerja organisasi dimasa mendatang yang mewujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal dan sistimatis. Sedangkan menurut *Government Standart Accounting Board* (GSAB) (dalam Bastian 2015:64) anggaran adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai dalam periode waktu tertentu.

Dari beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan suatu rencana kegiatan yang dioperasikan oleh suatu lembaga dalam mengelola anggaran yang terdiri dari sejumlah target yang ingin dicapai, dalam melaksanakan program serta kegiatan dalam jangka waktu tertentu dan upaya memenuhi kebutuhan didalam kelembagaan.

2.1.1.2 Fungsi Anggaran

Proses penganggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategi telah selesai dilakukan, tahap penganggaran sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun dalam upaya untuk mencapai tujuannya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh memiliki berbagai fungsi utama yang berkaitan dengan pencapaian tujuan tersebut.

Menurut Rudianto (2014:5) fungsi anggaran meliputi dari beberapa hal, yaitu:

1. Perencanaan (*planing*)
Anggaran merupakan rencana kerja yang menjadi pedoman bagi anggota organisasi dalam bertindak yang diupayakan untuk direalisasikan, memberi saran dan arah yang harus dicapai oleh bagian organisasi di dalam suatu periode waktu tertentu.
2. Pengorganisasian (*organizing*)
Setelah semua rencana ditetapkan, maka perusahaan mencari sumber daya yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana yang telah ditetapkan.
3. Menggerakkan (*actuating*)
Setiap sumber daya yang ada harus diarahkan, dikoordinasikan satu dengan yang lainnya agar dapat bekerja optimal untuk mencapai tujuan perusahaan.
4. Pengendalian (*controlling*)
Anggaran berguna sebagai alat penilai apakah aktivitas setiap bagian organisasi telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau tidak.

Menurut Nordiawan (2011:70) anggaran mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu sebagai:

1. Alat Perencanaan (*planing tool*)
Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi, dengan anggaran organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan dan kearah mana kebijakan yang dibuat. Anggaran sebagai alat perencanaan yang digunakan untuk:
 - a) Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

- b) Merencanakan sebagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaan.
 - c) Mengalokasikan dana pada berbagai program kegiatan yang telah disusun.
 - d) Menentukan indikator kinerja dan tingkat perencanaan strategi.
2. Alat Pengendalian (*control tool*)
- Anggaran sektor publik dapat menghindari pengeluaran yang terlalu besar (*overspending*) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya (*mispending*). Pengendalian dapat dilakukan melalui 4 (empat) cara, yaitu:
- a) Menbandingkan kinerja actual dengan kinerja yang dianggarkan.
 - b) Memperhitungkan selisih anggaran (*favoarable an unfovoarable variances*).
 - c) Merumuskan penyebab yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan.
 - d) Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.
3. Alat Kebijaksanaan.
- Anggaran dapat digunakan untuk menstabilisasi, mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasi kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.
4. Alat Politik (*political tool*)
- Anggaran merupakan dokumen politik sebagai komitmen eksekutif dan kesepakatan legeslatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Dalam alat politik anggaran merupakan komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan dapat dilihat melalui anggaran.
5. Alat koordinasi dan Komunikasi (*coordination and communication tool*)
- Melalui dokumen anggaran yang komprehensif, sebuah bagian atau unit kerja atau departemen yang merupakan suborganisasi yang mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh bagian/unit kerja lainnya.
6. Alat Penilaian Kerja (*performace measurement tool*)
- Anggaran adalah suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian atau unit kerja yang telah memenuhi target, baik berupa terlaksananya efektivitas maupun terpenuhinya efensiensi biaya. Kinerja manajer keuangan dinilai berdasarkan realisasi yang telah dicapai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran sebagai alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.
7. Alat Motivasi (*motivation tool*)
- Anggaran digunakan sebagai alat komunikasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai alat target pencapaian, dan sebagai alat motivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini anggaran berfungsi sebagai tolak ukur atau suatu pengantar manajem yang digunakan untuk menilai kegiatan yang dilaksanakan setiap bagian

manajemen telah sesuai dengan standar yang ditetapkan atau tidak. Jika realisasi pelaksanaan setiap manajemen lebih baik dari anggaran, maka dapat dinilai bahwa bagian tersebut telah berhasil mencapai rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Bastian (2015:80) fungsi anggaran sektor publik meliputi:

1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja.
2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan dimasa mendatang.
3. Anggaran sebagai alat komunikasi intern, yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar komunikasi atasan dengan bawahan.
4. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja.
5. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi.
6. Anggaran merupakan instrument publik.
7. Anggaran merupakan instrument kebijakan fiskal.

Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran sebagai tolak ukur memiliki fungsi dan manfaat yang saling berkaitan dan terintegrasi satu dengan lainnya saling melengkapi. Fungsi anggaran pada suatu Lembaga merupakan alat untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan kegiatan, fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan dan juga sebagai pedoman kerja dalam menjalankan unit kelembagaan untuk tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.1.3 Prinsip-Prinsip Anggaran

Menurut Bastian (2015:81) prinsip penyusunan anggaran (APBD/APBN) di Indonesia pada umumnya berlaku sama, yaitu:

1. Prinsip Anggaran yang Berimbang dan Dinamika.
Penyusunan APBD/APBN haruslah mencerminkan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran.
2. Prinsip Disiplin Anggaran.
Setiap Dinas/Lembaga hendaknya menggunakan secara efisien, tepat guna serta waktu dalam mempertanggung jawabkan.
3. Prinsip Kemandirian.
Mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi dalam rangka mengurangi ketergantungan kepada organisasi lain.

4. Prinsip Prioritas.
Pelaksanaan anggaran hendaknya tetap mengacu kepada prioritas utama pembangunan daerah.
5. Prinsip Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.
Menyediakan pembiayaan dan penghematan yang mengarah kepada skala prioritas. Efisiensi merupakan pembelanjaan anggaran secara cermat yaitu dengan penggunaan anggaran secara minimum untuk pencapaian hasil yang optimum, dan efektivitas merupakan penggunaan anggaran dengan tepat yaitu perbandingan antara hasil yang diharapkan dengan sesungguhnya tercapai.

Menurut Mardiasmo (2014:67) prinsip-prinsip anggaran sektor publik meliputi:

1. Otorisasi oleh Legislatif.
Anggaran sektor publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.
2. Komprehensif.
Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran Pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana *non budget* pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.
3. Keutuhan Anggaran.
Semua penerimaan dan belanja Pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (*general fund*).
4. *Nondiscretionary Appropriation*.
Jumlah yang disetujui oleh Dewan Legislatif harus dimanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif.
5. Periodik.
Anggaran merupakan sesuatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multitalunan.
6. Akurat.
Estimasi Anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dapat disajikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimasi pendapatan overtime pengeluaran.
7. Jelas.
Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan.
8. Diketahui Publik.
Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

Oleh karena itu maka dapat disimpulkan bahwa prinsip anggaran harus dilaksanakan sebagaimana mestinya terhadap realisasi anggaran tanpa adanya penyimpangan. Untuk mengetahui tingkat kegunaan anggaran, semua anggaran

disusun secara akurat dan sistematis, serta dilaporkan kepada Pemerintah/Publik sesuai dengan yang terjadi dilapangan, supaya semuanya tercermin dalam format pendapatan, belanja, maupun pembiayaan yang ada.

2.1.1.4 Klasifikasi Anggaran

Menurut Aries (2012:16) klasifikasi anggaran merupakan pengelompokan atau pembagian dari anggaran agar dapat memberikan gambaran yang lebih rinci. Maka klasifikasi anggaran dibagi kedalam beberapa bagian, diantaranya:

1. Berdasarkan Objek
Anggaran disusun berdasarkan jenis pendapatan dan belanja, pendapatan terdiri dari penerimaan dalam negeri yang terdiri dari atas penerimaan pajak dan pajak. Pendapatan lain adalah pendapatan hibah, dan sebagainya, sedangkan belanja diklasifikasikan dalam belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan dan sebagainya.
2. Berdasarkan Organisasi
Anggaran diklasifikasikan untuk melihat besar anggaran setiap unit, pencapaian efesiensi dan efektivitasnya, serta untuk melihat pengalokasian anggaran kepada sasaran-sasaran pembangunan secara nasional.
3. Berdasarkan Fungsi
Anggaran disusun berdasarkan fungsi belanja Negara seperti didalam sektor pendidikan, sektor sosial dan sebagainya.
4. Berdasarkan Sifat/Karakter
Anggaran disusun berdasarkan sifat/karakter pendapatan dan belanja seperti pendapatan dan belanja rutin (*carrent*) serta pendapatan dan belanja pembangunan (*capital expenditures*).
5. Berdasarkan Kehematan
Anggaran disusun berdasarkan skala ekonomisnya, yaitu sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kebijakan nasional.

Dari beberapa klasifikasi anggaran diatas dapat dilihat bahwa anggaran disusun berdasarkan bagiannya masing-masing. Dalam penelitian ini pada Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh akan lebih fokus pada penyusunan anggaran berdasarkan objek dan berdasarkan organisasinya masing-masing.

2.1.1.5 Proses Penyusunan Anggaran

Penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahunan merupakan rangkaian proses anggaran sebagai rincian pengeluaran yang ada dalam setahun. Menurut Mahsun (2011:68) proses penyusunan anggaran yaitu terdiri dari:

1. Tahap Persiapan Anggaran (*budget preparation*).
Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia dengan melakukan taksiran pendapatan secara lebih akurat, dan harus didasari adanya masalah cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran.
2. Tahap Retifikasi Anggaran (*budget retification*).
Tahap retifikasi merupakan tahap pengesahan anggaran, yang melibatkan politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan dituntut harus memiliki kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional dan pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legeslatif.
3. Tahap Implementasi Pelaksanaan Anggaran (*budget implementation*)
Dalam tahap ini manajer keuangan publik harus memperhatikan informasi akuntansi dalam sistem pengendalian manajemen, dan kemungkinan pada tahap ini terjadinya perubahan anggaran pada periode anggaran.
4. Tahap Pelaporan dari Evaluasi Anggaran (*budget reporting and evaluation*)
Dalam tahap ini diharapkan tidak akan menemukan banyak masalah, karena sebelumnya telah dilakukan penilaian dari aspek akuntabilitas dan implementasi dengan informasi akuntansi dalam sistem pengendalian yang baik, maka diharapkan tahap *budget reporting and evaluation* tidak menemukan banyak masalah.

Dalam satu tahun anggaran, penilaian terhadap kewajaran beban kerja usulan program atau kegiatan ini dikaitkan dengan kebijakan program komponen dan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Jangka waktu pelaksanaannya serta kapasitas satuan kerja untuk melaksanakannya sesuai dengan aturan yang ada. Menurut Mardiasmo (2012:68) proses penyusunan anggaran mempunyai 4 (empat) tujuan yaitu:

1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah.

2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemriorotasian.
3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
4. Meningkatkan transparansi dan pertanggung-jawaban kepada DPR-RI/DPRD dan masyarakat luas.

Sedangkan menurut Darise (2012:35) ada beberapa tujuan penyusunan anggaran antara lain sebagai berikut:

1. Untuk dilaksanakan sebagai landasan Yuridis formal dalam memilih sumber dan penggunaan anggaran.
2. Untuk mengadakan pembahasan jumlah dana yang dicari dan digunakan.
3. Untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis penganggaran, sehingga dapat mempermudah pengawasan.
4. Untuk merasionalkan sumber dan penggunaan dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
5. Untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun, karena dengan anggaran yang lebih jelas dan nyata terlihat.
6. Untuk menampung dan menganalisa serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan.

Pengelolaan keuangan publik melibatkan beberapa aspek, yaitu aspek penganggaran, aspek akuntansi, aspek pengendalian, dan aspek auditing. Aspek penganggaran mengantisipasi pendapatan dan belanja (*revenues and expenditures*). Sedangkan aspek akuntansi terkait dengan proses mencatat, mengolah, dan melaporkan segala aktivitas penerimaan dan pengeluaran (*receipts and disbursements*) atas dana pada saat anggaran dilaksanakan. Aspek penganggaran dipandang sebagai isu sentral bila dipandang dari sisi waktu. Aspek akuntansi lebih bersifat *retrospective* (pencatatan masa lalu) maka aspek penganggaran lebih bersifat *prospective* atau *anticipatory* (perencanaan masa yang akan datang).

2.1.1.6 Faktor-faktor Penyusunan Anggaran

Menurut Mardiasmo (2014:69) faktor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran sebagai berikut:

1. Tujuan dan target yang hendak dicapai.
2. Ketersediaan sumber daya (faktor-faktor produksi yang dimiliki pemerintah).
3. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target.
4. Faktor lainnya dengan munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial dan politik, bencana alam dan sebagainya.

Menurut Rudianto (2014:10) faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran antara lain:

1. Tingkat Kesulitan.
Anggaran yang terlalu sulit untuk dicapai membuat pelaksana anggaran tidak akan bersemangat dalam mencapainya. Anggaran yang terlalu mudah dicapai, mungkin dapat membuat pelaksana anggaran tidak berprestasi sesuai dengan kemampuan maksimalnya karena kurang motivasi. Anggaran harus dibuat seoptimal dan serealistik mungkin, yaitu anggaran disusun dengan standar yang mampu dicapai dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan.
2. Partisipasi Manajemen Puncak.
Manajemen puncak harus berpartisipasi dalam meninjau dan mengesahkan anggaran. Tanpa partisipasi aktif dalam proses pengesahan, akan memperlambat para pelaksana anggaran untuk menyerahkan anggaran yang mudah dicapai.
3. Keadilan.
Pelaksana anggaran harus percaya bahwa anggaran memang adil agar anggarannya efektif, dengan sistem anggaran yang dimulai dari bawah ke atas (bottom up), dimana pelaksana anggaran yang menyiapkan usulan anggaran tersebut. Tingkat kesulitan diantara para pelaksana anggaran harus sejajar, agar tidak menimbulkan kecemburuan antara satu bagian dengan bagian lainnya pada pelaksanaan anggaran.
4. Kesulitan Departemen Anggaran.
Departemen anggaran harus menganalisis anggaran secara rinci, dan harus merasa seperti bahwa anggaran telah disiapkan secara semestinya serta yakin bahwa informasi yang terkandung di dalamnya akurat.
5. Struktur Organisasi. Pelaksana anggaran yang berada dalam organisasi yang sangat terstruktur cenderung memiliki pengaruh besar, lebih banyak berpartisipasi dalam perencanaan anggaran.
6. Sumber Daya Perusahaan.

Pihak manajemen harus memperhitungkan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk merealisasikan rencana kerja perusahaan tersebut, agar anggaran yang disusun memiliki target yang lebih tinggi.

2.1.1.7 Pihak yang Terlibat Dalam Proses Anggaran

Ditingkat nasional, penentuan prioritas-prioritas anggaran dan negoisasi alokasi anggaran yang digunakan sangat tersentralisasi. Ditingkat nasional biasanya terdapat sebuah badan yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan proposal anggaran untuk pengeluaran masing-masing bidang fungsional pemerintah. Mereka memperoleh proposal untuk pendanaan seluruh departemen menurut fungsi dan membuat skala prioritas anggaran. Desentralisasi beberapa keputusan tentang alokasi sumber daya pada tingkat propinsi, kabupaten/kota memberi arti bahwa proses anggaran harus mampu untuk mengakomodasi pemain-pemain baru, yaitu pemerintah dan legeslatif di tingkat daerah.

Halim (2012:41) menjelaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses anggaran dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:

1. Eksekutif.
Secara umum, eksekutif bertanggungjawab untuk membuat keputusan dan melaksanakan Undang-Undang Negara. Eksekutif bertanggung jawab untuk merancang anggaran, membuat kerangka pengeluaran jangka menengah, mengatur seluruh sumber daya keuangan Negara dan memonitor departemen dalam membelanjakan uang Negara.
2. Legislatif.
Legislatif membuat dan mengesahkan Undang-Undang serta mengawasi eksekutif. Legeslatif mempunyai wewenang untuk mengulah anggaran, tetapi tidak untuk membuat ulang anggaran, melainkan dengan hanya mengubah pembelanjaan dalam anggaran. Legeslatif bertanggung jawab menentukan visi, misi, tujuan, arah dan kebijakan, strategi, dan penentuan prioritas secara luas baik ditingkat nasional maupun di daerah. Tanggung jawab utamanya adalah mengformulasikan strategi di tingkat nasional dan

di tingkat daerah, sehingga legeslatif lebih berperan dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap anggaran provinsi maupun daerah.

3. Masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam anggaran diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan anggaran, seperti kebocoran dan pemborosan dan penyimpangan pengalokasian anggaran yang cenderung lebih berorientasi pada kepentingan birokrasi bukan kepentingan masyarakat. Peran aktif masyarakat dengan memberikan informasi, menyampaikan saran dan pendapatnya secara bertanggung jawab dan langsung kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi sosisal masyarakat di daerah.

Suatu anggaran merupakan titik fokus keseluruhan proses perencanaan dan pengendalian. Anggaran membantu manajer dalam merencanakan kegiatan dan memonitor kinerja operasi serta laba yang dihasilkan oleh pusat pertanggung-jawaban.

2.1.2 Realisasi Anggaran Belanja

2.1.2.1 Pengertian Realisasi Anggaran Belanja

Realisasi mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap orang, realisasi diartikan sebagai proses pelaksanaan sesuatu hingga menjadi kenyataan. Di dalam istilah yang lebih luas, istilah ini digunakan hanya untuk mengartikan pengakuan (pelaporan) pendapatan. Menurut Bastian (2015:231) realisasi anggaran belanja merupakan proses pelaksanaan segala sesuatu yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh organisasi publik.

Maka dapat dikatakan bahwa realisasi merupakan kinerja atau hasil dari kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Realisasi tersebut dapat tercermin dari laporan kinerja yang mengiktisarkan serta menjelaskan secara singkat dan lengkap tentang pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang

ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

2.1.2.2 Sistem Realisasi Anggaran Belanja

Menurut Bastian (2015:237), pengelolaan operasi atau realisasi anggaran belanja dapat dilihat dari 3 (tiga) perspektif yang berbeda, yaitu:

1. Sebagai Fungsi.
Penetapan masing-masing fungsi kedalam departemen yang berbeda diasumsikan sebagai pertanggung jawaban atas aktivitas tertentu yang saling terkait satu sama lain.
2. Sebagai Penunjang Karier.
Operasi telah menjadi tingkatan karier menuju posisi manajemen yang lebih tinggi dengan baik di beberapa organisasi. Mobilitas keahlian yang meningkat dari para pengelola operasi sangat berhubungan dengan tantangan produktivitas terkini.
3. Sebagai Perangkat Keputusan.
Umumnya pembuatan keputusan melibatkan berbagai langkah dasar yang sama, seperti:
 - a) Pengenalan dan penjelasan definisi permasalahan,
 - b) Mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk menganalisis alternatif kemungkinan, dan
 - c) Memilih serta melaksanakan alternatif yang paling layak.

Pengelola operasi atau realisasi anggaran belanja mengacu pada arahan atau pengendalian sistematis atas proses yang mengubah input menjadi barang dan jasa. Dimana bagian keuangan bertugas menjamin dan menginvestasikan aset modal organisasi.

2.1.2.3 Siklus Realisasi Anggaran Belanja

Menurut Bastian (2015:240), setiap siklus realisasi anggaran belanja dibagi ke dalam 3 (tiga) tahapan utama, yaitu sebagai berikut:

1. Penyusunan Anggaran (pencairan), yaitu proses penganggaran dimana secara konseptual terdiri atas formulasi kebijakan anggaran dan perencanaan operasional anggaran.
 - a) Tahap persiapan yang terdiri dari kegiatan pembuatan prosedur dan formulir serta pembuatan anggaran kas.
 - b) Tahap proses pelaksanaan terdiri dari kegiatan belanja barang, jasa, dan modal.
 - c) Tahap penyelesaian terdiri dari kegiatan pengumpulan bukti untuk pencatatan barang dan modal serta pelaporan aktivitas kerja.
2. Realisasi Anggaran, yaitu suatu proses pelaksanaan segala sesuatu yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh organisasi publik, yang terdiri dari:
 - a) Tahap persiapan yang terdiri dari kegiatan menghitung potensi dan membuat regulasi untuk prosedur serta formulir.
 - b) Tahap proses pelaksanaan terdiri dari kegiatan penagihan dan pengumpulan pendapatan.
 - c) Tahap penyelesaian terdiri dari kegiatan rekapitulasi realisasi pendapatan serta pengenaan sanksi dan insentif.
3. Pelaksanaan Program, yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat dilaksanakan secara selaras dalam mencapai tujuan. Pelaksanaan program terdiri dari:
 - a) Tahap persiapan yang terdiri dari kegiatan pembentukan tim dan membuat tata aturan serta pembagian beban kerja.
 - b) Tahap proses pelaksanaan terdiri dari kegiatan pelaksanaan pekerjaan.
 - c) Tahap penyelesaian terdiri dari finalisasi produk dan pembuatan laporan.

Berdasarkan rangkaian kegiatan dalam siklus realisasi anggaran diatas, pada dasarnya ini merupakan rangkaian kegiatan setelah penetapan anggaran sehingga anggaran tersebut direalisasikan ke dalam kegiatan-kegiatan organisasi yang telah ditetapkan demi mencapai tujuan organisasi.

2.1.2.4 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Belanja

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komprehensif. Menurut Mahmudi (2013:171) laporan Realisasi Anggaran belanja lebih sekedar menunjukkan tingkat kepatuhan anggaran, tetapi

tidak secara spesifik menginformasikan aktivitas yang ada. Laporan realisasi anggaran disusun dengan basis, kas yang berarti juga menunjukkan kas riil, tetapi laporan tersebut belum spesifik menunjukkan pengaruh aktivitas Pemerintah dalam mempengaruhi kinerja keuangan Negara.

Menurut Darise (2012:95) laporan realisasi anggaran belanja disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan realisasi anggaran memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan-kebijakan yang ada, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

2.1.2.5 Tujuan Laporan Realisasi Anggaran Belanja

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, tujuan dari pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara periode. Perhitungan anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legeslatif dan eksekutif sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, tujuan standar laporan realisasi anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Menurut Bastian (2015:167) pengelola realisasi anggaran harus membantu memutuskan produk atau layanan/jasa apa saja yang diberikan, apa prioritas organisasi, apa tujuan kualitasnya dan bagaimana mengelola sumber dayanya. Laporan realisasi anggaran operasional disajikan sedemikian rupa sehingga menunjukkan unsur biaya operasional yang ada dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Sehingga terjadinya kesesuaian antara anggaran yang ada dengan hasil yang didapatkan dilapangan. Laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu laporan suatu entitas berubah dan laporan realisasi anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun.

2.1.2.6 Manfaat Informasi Laporan Realisasi Anggaran Belanja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Laporan Realisasi Anggaran, manfaat suatu laporan realisasi anggaran berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat waktu. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu. Suatu entitas pelaporan menyajikan laporan realisasi anggaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Menurut Darise (2012:96), manfaat informasi laporan realisasi anggaran belanja mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomis, akuntabilitas, dan ketepatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a) Menyediakan informasi mengenai sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomis.
- b) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja dalam hal efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran.
- 2. Laporan informasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomis yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomis:
 - a) Telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan hemat
 - b) Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya
 - c) Telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Laporan realisasi anggaran disajikan sedemikian rupa, dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan realisasi anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang dan lebih pendek dari satu tahun.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan menjadi sumber referensi bagi peneliti, antara lain: Sari, dkk. (2018) meneliti tentang analisis efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Pemerintah Kota Samarinda. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa efektifitas pelaksanaan anggaran belanja pada tahun 2014 tertinggi dan tahun 2013 terendah, sedangkan pada tahun 2011, 2012, dan 2015 pada tingkat kurang efektif. Efisiensi pelaksanaan anggaran belanja secara keseluruhan sudah dikelola secara baik.

Selanjutnya pada tahun 2017, Basariyah meneliti tentang analisis efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMD) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tingkat dan kriteria efektifitas untuk pelaksanaan anggaran belanja pada BPMD tahun 2011-2015 rata-rata secara keseluruhan terlaksana secara efektif. Pada tingkat efisiensi yang dihasilkan selama tahun penelitian menunjukkan rata-rata pengelolaan anggaran belanja cukup efisien.

Untari (2016) yang meneliti tentang analisis efisiensi dan efektifitas pelaksanaan realisasi anggaran belanja langsung pada Dinas Pendidikan Kota Semarang. Hasil penelitian mengemukakan bahwa penggunaan anggaran belanja pada tingkat efisiensi sudah efisien dan tingkat efektifitas sudah dikategorikan efektif.

Selanjutnya, Pangkey dan Pinatik (2015) meneliti tentang analisis efektivitas dan efisiensi anggaran belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian untuk tingkat efektifitas dan efisiensi secara keseluruhan tidak efektif dan efisien.

Kemudian penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Julita (2014) melakukan penelitian yang berjudul analisis efektifitas dan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dilihat menggunakan rasio varians kinerja anggaran pendapatan dan belanja sudah baik. Jika dilihat dari tingkat efektifitas kinerja anggaran pendapatan dan belanja sangat efektif dan jika

dilihat dari tingkat efisiensi kinerja anggaran pendapatan dan belanja sangat efisien.

Untuk lebih jelas, berapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan terkait dengan penelitian ini tercantum dalam Tabel 2.1:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Sari, dkk. (2018)	Analisis pelaksanaan anggaran belanja pada Pemerintah Kota Samarinda	Pada penelitian ini dalam menganalisis anggaran belanja, juga menggunakan rasio efektifitas.	Pada penelitian ini, objek penelitian dilakukan pada Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Kota Samarinda.	Efektifitas pelaksanaan anggaran belanja pada tahun 2014 tertinggi dan tahun 2013 terendah, sedangkan pada tahun 2011, 2012, dan 2015 pada tingkat kurang efektif. Efisiensi pelaksanaan anggaran belanja secara keseluruhan sudah dikelola secara baik.
2.	Basariyah (2017)	Analisis efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pemberdayaa n Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMD) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.	Pada penelitian ini dalam menganalisis anggaran belanja, juga menggunakan rasio efektifitas.	Pada penelitian ini, objek penelitian dilakukan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMD) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.	Tingkat dan kriteria efektifitas untuk pelaksanaan anggaran belanja pada BPMD tahun 2011-2015 rata-rata secara keseluruhan terlaksana secara efektif. Pada tingkat efisiensi yang dihasilkan selama tahun penelitian menunjukkan rata-rata

Tabel 2.1 Lanjutan

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
					pengelolaan anggaran belanja cukup efisien
3.	Untari (2016)	Analisis efisiensi dan efektivitas pelaksanaan realisasi anggaran belanja langsung pada Dinas Pendidikan Kota Semarang.	Pada penelitian ini dalam menganalisis anggaran belanja, juga menggunakan rasio efektifitas.	Pada penelitian ini, objek penelitian dilakukan pada Dinas Pendidikan Kota Semarang.	Penggunaan anggaran belanja pada tingkat efisiensi sudah efisiensi dan tingkat efektifitas sudah dikategorikan efektif
4.	Pangkey dan Pinatik (2015)	Analisis efektifitas dan efisiensi anggaran belanja pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara	Pada penelitian ini dalam menganalisis anggaran belanja, juga menggunakan rasio efektifitas.	Pada penelitian ini, objek penelitian dilakukan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara.	Anggaran belanja untuk tingkat efektifitas dan efisiensi secara keseluruhan tidak efektif dan efisien
5.	Julita (2014)	Analisis efektifitas dan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara	Pada penelitian ini dalam menganalisis anggaran belanja, juga menggunakan rasioefektifitas dan efisiensi.	Pada penelitian ini menganalisis anggaran pendapatan dan belanja juga menggunakan rasio varians.	Jika dilihat menggunakan rasio varians kinerja anggaran pendapatan dan belanja sudah baik. Jika dilihat dari tingkat efektifitas kinerja anggaran pendapatan dan belanja sangat efektif dan jika dilihat dari tingkat efisiensi kinerja anggaran pendapatan dan belanja sangat efisien

Sumber: Data diolah, 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian atau rancang bangun penelitian merupakan rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa, sehingga penelitian dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Rencana itu merupakan suatu skema menyeluruh yang mencakup program penelitian (Kerlinger, 2000:24). Menurut Sekaran (2013:155) Desain penelitian dijelaskan sebagai berikut:

1) Tujuan Studi

Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui bagaimana realisasi anggaran belanja pada Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh Tahun 2016-2018.

2) Jenis Investigasi

Penelitian yang di lakukan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan sifat-sifat dan keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian.

3) Tingkat Intervensi Peneliti.

Tingkat intervensi peneliti dalam penelitian ini adalah intervensi minimal dimana peneliti melakukan penelitiannya tanpa mengintervensi aktivitas normal pada Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh Tahun 2016-2018.

4) Pengaturan Studi

Dalam penelitian ini diperlukan data dari usaha yang sebenarnya yaitu studi Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh Tahun 2016-2018.

5) Unit Analisis

Unit analisis penelitian ini adalah pada Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh Tahun 2016-2018 tahun 2016-2018 yang berlokasi di Desa Bineuh Blang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

6) Horizon Waktu

Horizon waktu dalam penelitian ini adalah *one shoot*, yaitu studi dapat dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan, mungkin selama periode harian, mingguan, atau bulanan, dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian.

3.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini data-data kualitatif tersebut berupa informasi laporan keuangan pada Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh. Sedangkan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada yaitu berupa dokumentasi dan arsip yang ada di Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)
Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder melalui pengkajian bahan-bahan seperti buku-buku dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Penelitian Lapangan (*field research*)
Teknik ini dilakukan dengan cara meneliti secara langsung ke Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh untuk memperoleh informasi data anggaran yang dapat melengkapi penyusunan skripsi ini untuk mengumpulkan data

lapangan digunakan instrument sebagai berikut:

- a) Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi yang sebenarnya di lokasi penelitian. Segala gejala dan aktivitas yang berlangsung pada objek dan subjek dilaporkan.
- b) Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan instrumen penelitian yaitu pedoman wawancara penelitian. Dalam hal ini penanya adalah si penulis, sedangkan responden adalah Kepala Sub Bagian Keuangan dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh.
- c) Dokumentasi, adalah proses mengumpulkan bukti-bukti atas penelitian yang dilakukan. Bukti-bukti tersebut yaitu foto-foto, lembaran hasil wawancara, lembaran mengenai anggaran, dalam hal ini laporan realisasi anggaran belanja pada Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh.

3.4 Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui realisasi anggaran pada Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu untuk memberikan gambaran dan menjelaskan tentang kedudukan, fungsi dan problematika realisasi anggaran pada Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh. Untuk menjawab masalah dalam penelitian ini maka penulis menggunakan analisis rasio efektivitas dan efisiensi.

- 1) Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan anggaran belanja, (Munawir, 2013:168) yaitu:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Menurut Munawir (2013:170) dalam mengukur tingkat selisih anggaran belanja baik menguntungkan maupun tidak menguntungkan antara realisasi dengan anggaran belanja, harus diketahui tingkat efektifitas dalam pencapaian penggunaan anggaran belanja, sehingga besaran nominal selisih anggaran dengan

realisasi dapat dinilai signifikan atau tidak. Maka nilai untuk mengukur efektivitas dapat di kategorikan sebagai berikut:

- Sangat Efektif 100 %
- Efektif 90 % - 99,9 %
- Cukup Efektif 80 % - 89,9 %
- Kurang Efektif 60 % - 79,9 %
- Tidak Efektif ≤ 60 %

2) Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja (Halim, 2012:41):

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Menurut Halim (2012:41) analisis efisiensi pengelolaan anggaran dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari suatu pelaksanaan kegiatan atau proyek. Maka nilai untuk mengukur efisiensi dapat di kategorikan sebagai berikut:

- Sangat Efisien $\leq 60\%$
- Efisien 60 % - 79 %
- Cukup Efisien 80 % - 89 %
- Kurang Efisien 90 % - 100 %
- Tidak Efisien > 100 %

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh

4.1.1 Sejarah Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh adalah Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan (UPT) dan bertanggungjawab pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh. Tugas Pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh adalah melaksanakan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Disamping tugas pokok tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh juga mempunyai tugas pelayanan dan perawatan, yaitu terkait dengan pelayanan kesehatan dan makanan. Keseluruhan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh tersebut berwujud hak-hak binaan yang diatur dalam pasal 14 Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Selanjutnya dalam perkembangannya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 1964 semakin bagus dengan diaturnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dengan Undang-Undang Pemasyarakatan ini usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila, yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, orang yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri agar tidak

mengulagi lagi perbuatan tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat aktif berperan penting dalam pembangunan, dapat hidup sebagai manusia normal lainnya, menonjolkan perilaku baik dan bertanggungjawab.

Gedung Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh dibangun dari tahun 2006 dengan pembiayaan dari Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh-Nias (BRR). Pada tahun 2010 sampai tahun 2012 pembangunan dilanjutkan dengan dibiayai oleh dana Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN). Pada awal tahun 2012 Gedung Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh selesai dibangun, dan akhir bulan maret tepatnya tanggal 27 Maret 2012 Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh telah difungsikan dengan Sarana dan Prasarana yang masih minim.

Pada tanggal 27 September 2012, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh mendapat kunjungan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI beserta rombongan. Kedatangan Menteri juga sekaligus untuk meresmikan operasional gedung baru Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh yang berada di Jalan Lembaga Desa Bineuh Blang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

Gedung Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh yang merupakan Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan (UPT) dan bertanggungjawab pada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh, terletak di Desa Bineuh Blang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Sejak

menempati gedung baru pada tahun 2012 sampai dengan sekarang Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh sudah dipimpin oleh sepuluh (10) orang kepala UPT yaitu:

1. Bapak Ridwan Salam, SH. (Tahun 2011- 2012).
2. Bapak Muhammad Tavip, SH.,MH. (Tahun 2012-2014).
3. Bapak Marasutan, SH. (Tahun 2014).
4. Bapak Ibnu Syuker, BC.IP., SH. (Tahun 2014-2015)
5. Bapak Ahmad Faidhoni, SH.,MH. (Tahun 2015).
6. Bapak Djoko Budi Setianto, BC.IP., S.sos. (Tahun 2015-2016).
7. Bapak Muhammad Drais Sidik, BC.IP.,SH.,MH. (Tahun 2016-2017).
8. Bapak Endang Lintang Hardiman, SH.,MH. (Tahun 2017-2019).
9. Bapak Abdul Karim, SH.,MH. (Tahun 2019).
10. Bapak Ridha Ansari, SH. (Tahun 2019-sekarang).

4.1.2 Visi dan Misi Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh

Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh memiliki Visi yaitu, “Menjadikan Lembaga Pemasyarakatan yang terpercaya dalam memberikan pembinaan, pelayanan dan pembinaan dan perlindungan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan serta masyarakat”.

Untuk tercapainya Visi tersebut, maka yang menjadi Misi Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh, yaitu: “Membina dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan dibidang kegiatan kerja dan kerohanian yang memiliki keunggulan dalam keterampilan teknologi melalui pembinaan, pelatihan serta pembimbingan kerja, sehingga diharapkan menjadi manusia bermoral Pancasila yang siap bersosialisasi dengan masyarakat dan berprinsip pada kemandirian.”

4.1.3 Struktur Organisasi Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya baik secara teknis maupun administratif Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh terdiri atas lima (5)

Seksi yaitu:

1. Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP)
2. Subbag Tata Usaha
3. Seksi Keamanan dan Tata Tertib
4. Seksi Bimnadik
5. Seksi Kegiatan Kerja

Adapun setiap Seksi mempunyai Sub Seksi yaitu sebagai berikut :

1. Kaur Umum
2. Kaur Kepegawaian
3. Kasubsi Registrasi
4. Kasubsi Bimkemaswat
5. Kasubsi Keamanan
6. Kasubsi Pelaporan dan Tata Tertib
7. Kasubsi Sarana Kerja
8. Kasubsi Pelaporan Hasil Kerja

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja

Setelah melakukan penelitian pada Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh, maka didapatkan laporan anggaran dan realisasi belanja yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1
Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja
Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh
Tahun Anggaran 2016-2018

Tahun	Jumlah Anggaran Belanja	Jumlah Realisasi Belanja	Sisa
2016	Rp. 9.058.254.000	Rp. 8.802.653.392	Rp. 255.600.608
2017	Rp. 8.915.223.000	Rp. 8.907.076.854	Rp. 8.146.146
2018	Rp. 11.479.949.000	Rp. 11.437.302.550	Rp. 42.646.450

Sumber: Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh (data diolah, 2021)

Dari Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa jumlah anggaran belanja Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh mengalami fluktuasi, sedangkan realisasi anggaran belanja mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, jumlah anggaran belanja Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh sebesar Rp. 9.058.254.000. Anggaran tersebut direalisasikan sebesar Rp. 8.802.653.392 dan memiliki sisa sebesar Rp. 255.600.608.

Pada tahun 2017, jumlah anggaran belanja Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh turun dari tahun sebelumnya yaitu menjadi Rp. 8.915.223.000. Dalam hal realisasi, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 8.907.076.854 dan hanya tersisa sebesar Rp. 8.146.146.

Pada tahun 2018, jumlah anggaran belanja Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh mengalami peningkatan dari tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 11.479.949.000. Anggaran tersebut mampu direalisasikan sebesar Rp. 11.437.302.550, realisasi anggaran tersebut juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dan hanya memiliki sisa Rp. 42.646.450.

4.2.2 Analisis Efektivitas Anggaran Belanja Pada Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh

Robbins dan Mary (2015:129) mendefenisikan efektifitas sebagai tingkat pencapaian organisasi jangka pendek dan jangka panjang. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran atau output program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi *output* pada pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.

Untuk melihat tingkat efektivitas anggaran belanja, yaitu berdasarkan yang telah ditetapkan oleh Munawir (2013:170) sebagai berikut:

- Sangat Efektif 100 %
- Efektif 90 % - 99,9 %
- Cukup Efektif 80 % - 89,9 %
- Kurang Efektif 60 % - 79,9 %
- Tidak Efektif ≤ 60 %

Berdasarkan hasil pengamatan pada anggaran belanja dan realisasi belanja Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh Tahun Anggaran 2016-2018, maka analisis realisasi anggaran belanja berdasarkan rasio efektivitas sebagai berikut:

a) Rasio Efektivitas Tahun Anggaran 2016

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Anggaran}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\% = \frac{8.802.653.392}{9.058.254.000} \times 100\% = 97,18\%$$

b) Rasio Efektivitas Tahun Anggaran 2017

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Anggaran}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\% = \frac{8.907.076.854}{8.915.223.000} \times 100\% = 99,91\%$$

c) Rasio Efektivitas Tahun Anggaran 2018

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Anggaran}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\% = \frac{11.437.302.550}{11.479.949.000} \times 100\% = 99,63\%$$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel Rasio Efektivitas sebagai berikut:

Tabel 4.2
Rasio Efektivitas
Tahun Anggaran 2016-2018

Tahun	Jumlah Anggaran Belanja	Jumlah Realisasi Anggaran Belanja	Tingkat Efektivitas (%)	Kategori
2016	Rp. 9.058.254.000	Rp. 8.802.653.392	97,18	Efektif
2017	Rp. 8.915.223.000	Rp. 8.907.076.854	99,91	Efektif
2018	Rp. 11.479.949.000	Rp. 11.437.302.550	99,63	Efektif

Sumber: Data diolah, 2021

Analisis efektivitas anggaran belanja Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar efektivitas dari suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Pada Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 efektivitas anggaran belanja Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh berada di kategori Efektif

dengan nilai rasio efektivitas sebesar 97,18%, 99,91% dan 99,63%. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan anggaran belanja Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh telah berjalan sesuai harapan, yaitu tepat pada apa yang telah menjadi target anggaran.

4.2.3 Analisis Efisiensi Anggaran Belanja Pada Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh

Marbun, dkk. (2014:101) menyatakan pengertian efisiensi adalah menekan biaya serendah mungkin untuk meningkatkan keuntungan. Secara luas pengertian efisiensi adalah perbandingan terbaik antara masukan dan hasil. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau *dengan* input tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya.

Untuk melihat tingkat efisiensi anggaran belanja, yaitu berdasarkan yang telah ditetapkan oleh Halim (2012:41) sebagai berikut:

- Sangat Efisien $\leq 60\%$
- Efisien 60 % - 79 %
- Cukup Efisien 80 % - 89 %
- Kurang Efisien 90 % - 100 %
- Tidak Efisien $> 100 \%$

Berdasarkan hasil pengamatan pada anggaran belanja dan realisasi belanja Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh Tahun Anggaran 2016-2018, maka analisis realisasi anggaran belanja berdasarkan rasio efisiensi sebagai berikut:

- a) Rasio Efisiensi Tahun Anggaran 2016

$$= \frac{\text{Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100 = \frac{9.058.254.000}{8.802.653.392} \times 100\% = 102,90\%$$

b) Rasio Efisiensi Tahun Anggaran 2017

$$= \frac{\text{Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100 = \frac{8.915.223.000}{8.907.076.854} \times 100\% = 100,09\%$$

c) Rasio Efisiensi Tahun Anggaran 2018

$$= \frac{\text{Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\% = \frac{11.479.949.000}{11.437.302.550} \times 100\% = 122,54\%$$

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel rasio efisiensi sebagai berikut:

Tabel 4.3
Rasio Efisiensi
Tahun Anggaran 2016-2018

Tahun	Jumlah Anggaran Belanja	Jumlah Realisasi Anggaran Belanja	Tingkat Efisiensi (%)	Kategori
2016	Rp. 9.058.254.000	Rp. 8.802.653.392	102,90	Tidak Efisien
2017	Rp. 8.915.223.000	Rp. 8.907.076.854	100,09	Tidak Efisien
2018	Rp. 11.479.949.000	Rp. 11.437.302.550	100,37	Tidak Efisien

Sumber: Data diolah, 2019

Analisis efisiensi anggaran Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh dimaksudkan untuk seberapa besar efisiensi dari suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Pada Tahun Anggaran 2016, 2017, dan 2018 efisiensi anggaran belanja Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh berada di kategori Tidak Efisien dengan nilai rasio efisiensi sebesar 102,90%, 100,09% dan 100,37%. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan anggaran belanja Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh cenderung tidak

hemat dalam melakukan pengeluaran. Tidak efisiennya anggaran belanja Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh terjadi karena adanya kecenderungan pemborosan dalam pengalokasian anggaran belanja. Dengan tidak efisiennya anggaran belanja, dampak yang terjadi adalah akan mengurangi kepercayaan Pemerintah Pusat dalam menganggarkan dana kepada Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh, karena kurang hematnya Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh dalam menggunakan dana anggaran belanja. Solusi dari ketidakefisiennya anggaran belanja Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh adalah harus mengevaluasi ulang sektor kegiatan yang akan didanai sehingga dana yang dikucurkan dapat tepat guna dan agar tidak adanya kebocoran dana anggaran belanja.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Efektivitas Anggaran Belanja pada Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh

Dari hasil pengamatan pada laporan anggaran dan realisasi Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh pada Tahun Anggaran 2016-2018, maka efektivitas pelaksanaan anggaran belanja tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018, berada pada kategori Efektif. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal pelaksanaan anggaran belanja Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh mengalami kestabilan kinerja terkait dalam hal belanja. Menurut Ihyaul (2015:26) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*pending wisely*). Agar dapat memperbaiki kinerja dalam hal ini terkait belanja, Kantor Lapas

Kelas II A Banda Aceh sebaiknya mengevaluasi kembali apa yang menjadi keperluan untuk belanja serta menetapkan anggaran belanja sesuai dengan keperluan. Dengan demikian, pelaksanaan pengeluaran menjadi lebih efektif.

4.3.2 Efisiensi Anggaran Belanja pada Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh

Dari hasil pengamatan pada laporan anggaran dan realisasi belanja Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh pada tahun anggaran 2015-2017, maka efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh tahun anggaran 2016-2018, selama tiga tahun berada pada kategori Tidak Efisien. Hal ini mengindikasikan adanya kecenderungan pemborosan anggaran. Nordiawan dan Ayuningtiyas (2014:161) menjelaskan bahwa efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa yang dihasilkan sebuah kegiatan atau aktivitas dengan sumber daya yang digunakan. Suatu organisasi, kegiatan atau program dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya (*spending well*) Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh harus mampu menekan biaya serendah mungkin agar meningkatkan kinerja, sehingga tingkat efisiensi belanja menjadi lebih efisien.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Realisasi anggaran belanja Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh berdasarkan analisis rasio efektivitas Tahun Anggaran 2016-2018 pada kategori Efektif dengan nilai efektivitas sebesar 97,18% pada tahun 2016, sebesar 99,91% pada tahun 2017, dan sebesar 99,63% pada tahun 2018.
2. Realisasi anggaran belanja Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh berdasarkan analisis rasio efisiensi Tahun Anggaran 2016-2018 pada kategori Tidak Efisien dengan nilai efisiensi sebesar 102,90% pada tahun 2016, sebesar 100,09% pada tahun 2017, dan sebesar 100,37% pada tahun 2018.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan penelitian ini, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam upaya mewujudkan tujuan dari Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh yang sebenarnya, maka kiranya perlu diambil beberapa kebijakan agar Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh mampu memperhitungkan estimasi-estimasi

kejadian pada masa yang akan datang sehingga realisasi dengan anggaran tidak jauh berbeda.

2. Mengingat pentingnya suatu efektivitas dan efisiensi dalam sebuah organisasi, maka sebaiknya anggaran dan program Kantor Lapas Kelas II A Banda Aceh disusun secara teliti dan sebaiknya dilakukan secara seksama sehingga benar-benar menjadi pedoman kerja.
3. Penelitian selanjutnya, diharapkan memilih periode waktu yang lebih panjang dan objek penelitian yang berbeda untuk memberikan hasil penelitian yang lebih bervariasi juga diharapkan dapat menambah beberapa rasio kinerja keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aries, Djaenuri. (2012). *Hubungan Keuangan Pusat Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Basariyah, Siti. (2017). Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMD) Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Katalogis*, 5 (6), 63-74.
- Bastian, Indra. (2015). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Darise, Nurlan. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Indeks
- Halim, Abdul. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Empat. Salemba Empat. Jakarta.
- Ihyaul, Ulum. (2015). *Audit Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Julita. (2014). Analisis efektivitas dan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Kerlinger, FN. (2000). *Asas-asas penelitian behavior*. Terjemahan Landung R Simatupang. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mahmudi. (2013). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2011). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta. BPFE.
- Mardiasmo. (2012). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset
- Mardiasmo. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Marbun, dkk. (2014). *Kamus Manajemen*. Jakarta: Media Pustaka.
- Miles, M. B, dan Huberman, A. M. (2012).
- Munandar, A. S. (2014). *Psikologi Industri dan Organisasi*. Jakarta: UI Press.

- Munawir. (2013). *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Liberty.
- Nafarin, M. (2012). *Penganggaran Rencana Kerja Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nordiawan, Dedi. (2011). *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pangkey, Imanuel. (2015). Analisis efektivitas dan efisiensi anggaran belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 3 (4), 33-43.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Laporan Realisasi Anggaran.
- Robbins, Stephen P & Coulter, Mary. (2015). *Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Rudianto. (2014). *Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta: Grasindo.
- Sari, Dwi Novita, Sri Minarti dan Salmah Pattisahusiwa. (2018). Analisis efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Pemerintah Kota Samarinda. *Jurnal KINERJA*, 15, (1), 38-45.
- Sekaran, & Bougie. (2013). *Research Methods for Business: A skill Building Approach*. New York: John wiley Sons.
- Untari, Rusita. (2016). Analisis efisiensi dan efektivitas pelaksanaan realisasi anggaran belanja langsung pada Dinas Pendidikan Kota Semarang Tahun 2011-2014. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.